

Persepsi Masyarakat Miskin terhadap Pendidikan sebagai Alat Mobilitas Sosial

Aulia Mumtaz Salsabila Anshori¹, Dewien Nabelah Agustin^{2*}

^{1,2}Universitas Negeri Surabaya

*Corresponding author, e-mail: dewienagustin@unesa.ac.id

Abstrak

Pendidikan dianggap sebagai kunci utama dalam mengatasi kemiskinan dan mendorong mobilitas sosial. Namun, masyarakat miskin masih menghadapi berbagai kendala dalam mengakses pendidikan yang layak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji persepsi masyarakat miskin terhadap pendidikan sebagai sarana mobilitas sosial, serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan kualitatif, berdasarkan sumber dari buku, jurnal, dan artikel ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat miskin menilai pendidikan penting untuk masa depan anak-anak mereka. Namun, ada pula yang meragukan manfaat pendidikan tinggi dalam meningkatkan taraf hidup. Hambatan utama mencakup kemiskinan struktural, rendahnya pendidikan orang tua, keterbatasan fasilitas, dan tekanan ekonomi keluarga. Program pemerintah seperti PKH dan KIP Kuliah sudah ada, tetapi belum merata pelaksanaannya.

Kata Kunci: Masyarakat miskin; Mobilitas sosial; Pendidikan.

Abstract

Education is considered the key to overcoming poverty and promoting social mobility. However, the poor still face various obstacles in accessing quality education. This research aims to examine the perceptions of the poor regarding education as a means of social mobility, as well as the factors influencing it. The method used is a literature review with a qualitative approach, based on sources from books, journals, and scientific articles. The research results show that the majority of the poor community consider education important for the future of their children. However, there are also those who doubt the benefits of higher education in improving living standards. The main obstacles include structural poverty, low parental education, limited facilities, and family economic pressure. Government programs like PKH and KIP Kuliah already exist, but their implementation is not yet uniform.

Keywords: Education; Poor community; Social mobility.

How to Cite: Anshori, A. M. S & Agustin, D. N. (2025). Persepsi Masyarakat Miskin terhadap Pendidikan sebagai Alat Mobilitas Sosial. *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan*, 8(3), 394-401.



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Share-Alike 4.0 International License. If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original. ©2025 by author.

Pendahuluan

Pendidikan telah lama dipandang sebagai sarana utama dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan mendorong mobilitas sosial. Pengaruh pendidikan terhadap tingkat kemiskinan menunjukkan nilai yang sangat signifikan. [Setiani et al., \(2023\)](#) dalam penelitiannya mengenai peran pendidikan dalam pengentasan kemiskinan di provinsi Jawa Barat menunjukkan hasil bahwa setiap tambahan satu tahun pendidikan dapat berkontribusi pada penurunan potensi kemiskinan. Peran pendidikan tidak hanya dilihat sebagai proses belajar mengajar, melainkan sebagai instrumen strategis dalam mengubah struktur sosial dan membuka peluang kehidupan yang lebih baik bagi individu maupun kelompok masyarakat. [Lutfillah et al., \(2022\)](#) menjelaskan bahwa pendidikan merupakan suatu proses yang bertujuan untuk membentuk dan mengembangkan sikap serta perilaku individu atau kelompok, sebagai bagian dari usaha untuk mendewasakan manusia melalui kegiatan pengajaran dan pelatihan, proses, metode, dan tindakan mendidik.

Dalam paradigma modern, Individu diyakini dapat memperbaiki nasib melalui pencapaian pendidikan yang tinggi. Pendidikan diharapkan memberi semua orang memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan sosial. Namun, dalam realitanya akses terhadap pendidikan yang berkualitas masih menjadi tantangan nyata, khususnya bagi kalangan masyarakat miskin. Mereka seringkali menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan finansial dan tuntutan ekonomi keluarga, yang berdampak pada rendahnya partisipasi dan prestasi pendidikan serta memperkuat lingkaran kemiskinan antar generasi ([Ali & Asriwandari, 2024](#)).

Menurut [Ustama \(2009\)](#) kemiskinan adalah kondisi di mana individu atau kelompok masyarakat tidak dapat memenuhi hak-hak dasar mereka untuk hidup bermartabat. Ketidakmampuan ini ditunjukkan oleh rendahnya pendapatan yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan. Akibatnya membatasi akses terhadap standar hidup layak, termasuk dalam bidang kesehatan dan pendidikan. Di Indonesia, kemiskinan masih menjadi persoalan kompleks. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2024, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 24,06 juta jiwa, atau sekitar 8,57% dari total populasi. Meskipun terdapat penurunan dari periode sebelumnya, kesenjangan sosial-ekonomi dan ketimpangan akses pendidikan masih menjadi tantangan nyata. Angka Kemiskinan di wilayah pedesaan tercatat sebesar 11,34%, jauh lebih tinggi dibandingkan kawasan perkotaan yang sebesar 6,66%.

Dari perspektif sosiologi, kemiskinan dipandang sebagai kondisi di mana seseorang tidak mampu mempertahankan kehidupannya sesuai dengan standar yang berlaku dalam kelompok sosialnya, serta tidak dapat mengoptimalkan potensi fisik maupun mentalnya dalam interaksi sosial yang lebih luas. Hal ini menjadi bagian dari masalah sosial yang rentan menimbulkan berbagai persoalan, di mana masyarakat dengan kondisi ekonomi yang baik cenderung memperoleh status sosial yang tinggi, sementara mereka yang hidup dalam kemiskinan akan menghadapi posisi sosial yang lebih rendah ([Rahman et al., 2019](#)).

Dalam konteks ini, pendidikan menjadi salah satu sarana penting untuk mendorong mobilitas sosial. [Zamhari \(2012\)](#) menyatakan bahwa mobilitas sosial merupakan perubahan individu dari satu posisi sosial ke posisi sosial lain dalam struktur sosial, baik secara vertikal maupun horizontal. Mobilitas sosial vertikal terjadi ketika seseorang berpindah dari golongan sosial yang lebih tinggi atau lebih rendah ke lingkungan sosial baru. Mobilitas sosial ini berarti bahwa seseorang memasuki lingkungan sosial yang berbeda dengan sebelumnya. Sedangkan mobilitas horizontal mencakup perpindahan geografis pada individu atau kelompok tanpa perubahan status.

[Lutfillah et al., \(2022\)](#) menambahkan bahwa pendidikan memiliki tiga peran penting dalam mendorong mobilitas sosial. Pertama, pendidikan berfungsi sebagai dasar untuk perbaikan masyarakat. Kedua, pendidikan disesuaikan dengan tuntutan perubahan masyarakat yang diantisipasi dengan perubahan pedoman pendidikan. Ketiga, perubahan status seseorang juga menyebabkan perubahan cara berpikir untuk mengatasi kendala dan hambatan. Namun, mobilitas sosial juga sangat dipengaruhi oleh faktor struktural seperti seperti latar belakang sosial dan reproduksi sosial ([Arifin, 2017](#)). Berbagai kendala seperti keterbatasan biaya, rendahnya kualitas pendidikan, lokasi geografis yang sulit dijangkau, serta stigma sosial menjadi hambatan besar yang memperlemah fungsi pendidikan sebagai alat mobilitas sosial.

Teori kapital kultural dari Bourdieu memperkuat pemahaman ini dengan menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya bergantung pada usaha individu, tetapi juga pada modal budaya yang diwariskan keluarga. Modal ini mencakup nilai, kebiasaan, pengetahuan, serta sikap yang mendukung proses belajar. Lebih lanjut, Bourdieu dan Passeron menyoroti bahwa dominasi dalam sistem pendidikan terjadi karena perbedaan kepemilikan kapital budaya. Hal ini mencakup kebiasaan membaca, kemampuan berbahasa asing dan ilmiah, serta habitus seperti kedisiplinan dan kejujuran. Ketimpangan dalam kepemilikan modal ini menciptakan jarak sosial antara kelompok dominan dan kelompok terpinggirkan. ([Allolayuk, 2021](#)).

Selain kapital kultural, Bourdieu juga menjelaskan melalui teori habitus bagaimana relasi kuasa terjadi dalam struktur masyarakat tertentu. Habitus adalah struktur mental (kognitif) yang digunakan individu atau kelompok dalam menghadapi kehidupan sosial. Menurut Bourdieu, habitus merupakan rekomendasi tindakan dan pemikiran yang memberikan prinsip bagi orang saat memilih taktik untuk diterapkan di dunia sosial (Ariyani et al., 2018). Habitus atau pola pikir dan tindakan yang dibentuk oleh kondisi sosial-ekonomi ini membuat seseorang memiliki pilihan yang terbatas, termasuk pendidikan. Konsep habitus melihat realitas sosial dengan lebih kompleks, tidak hanya dari aspek ekonomi tetapi juga faktor-faktor lain yang mempengaruhinya (Arismunandar, 2009).

Realitas di masyarakat menunjukkan bahwa setiap individu memiliki cara pandang yang berbeda-beda terhadap pendidikan. Penelitian oleh Ali & Asriwandari (2024) terhadap keluarga miskin di kelurahan Sialangmunggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru menunjukkan bahwa mayoritas orang tua dari keluarga miskin memiliki pandangan yang positif terhadap pentingnya pendidikan formal sebagai upaya memperbaiki masa depan anak-anak mereka. Mereka memahami bahwa pendidikan dapat menjadi cara untuk keluar dari kemiskinan serta membuka kesempatan bagi anak-anak mereka untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat miskin memiliki persepsi yang kuat terhadap pentingnya pendidikan sebagai alat mobilitas sosial.

Namun, tidak semua masyarakat miskin memandang pendidikan sebagai prioritas utama. Penelitian oleh Jamaluddin et al., (2022) mengenai persepsi masyarakat pada remaja di desa Liprak Kidul, Probolinggo, menunjukkan bahwa meskipun pendidikan dianggap penting, sebagian masyarakat masih meragukan nilai pendidikan tinggi karena dianggap tidak menjamin pekerjaan yang layak. Banyak dari mereka lebih memilih agar anak segera bekerja untuk membantu perekonomian keluarga daripada melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana persepsi masyarakat miskin terhadap pendidikan sebagai alat mobilitas sosial, faktor-faktor yang memengaruhinya, serta bagaimana harapan mereka dibentuk oleh realitas sosial yang mereka alami. Dengan memahami dinamika persepsi ini, diharapkan pemerintah dan pemangku kepentingan dapat menyusun kebijakan pendidikan yang lebih inklusif, adil, dan efektif dalam mewujudkan pendidikan sebagai sarana peningkatan kesejahteraan dan kesetaraan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan penelitian yang menekankan analisis mendalam dengan mengutamakan proses dan makna dari perspektif subjek, serta berfokus pada peninjauan latar alamiah dari berbagai kasus sosial (Malahati et al., 2023). Metode kualitatif dalam penelitian ini digunakan memahami konseptual dan teoritis mengenai persepsi masyarakat miskin terhadap pendidikan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka. Menurut Adlini et al., (2022) studi pustaka (*library research*) yaitu pendekatan yang melibatkan pengumpulan data melalui pemahaman dan analisis teori-teori dari berbagai literatur yang relevan. Studi pustaka dalam penelitian ini menggunakan berbagai jenis literatur, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, dan referensi dari karya terdahulu yang membahas pendidikan dan kemiskinan, modal kultural, reproduksi sosial, serta habitus masyarakat miskin. Data yang dikumpulkan kemudian diseleksi berdasarkan relevansi, waktu publikasi (kurun waktu 10 tahun terakhir, yaitu antara 2015-2025), dan kelengkapan informasi untuk memastikan data yang dianalisis akurat dan representatif.

Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif yang terdiri dari tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahapan ini merupakan proses menyederhanakan data menjadi informasi secara sistematis hingga menghasilkan temuan penelitian yang mendalam tentang fenomena yang diteliti (Qomaruddin & Sa'diyah, 2024). Dalam penelitian ini data yang telah dianalisis kemudian dipresentasikan dalam bentuk uraian deskriptif yang mendalam untuk mengungkap bagaimana persepsi masyarakat miskin terhadap pendidikan.

Hasil dan Pembahasan

Persepsi Positif Masyarakat Miskin terhadap Pendidikan

Pendidikan secara umum dipahami sebagai salah satu cara untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan memperoleh posisi sosial yang lebih tinggi di masyarakat. Dalam perspektif mobilitas sosial, pendidikan dianggap memiliki peran penting sebagai alat untuk berpindah dari golongan sosial ekonomi rendah ke strata yang lebih tinggi. Keyakinan ini didasarkan pada asumsi bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin besar pula peluang untuk meraih pekerjaan yang layak, memperoleh

pendapatan yang stabil, dan dihormati secara sosial. Seperti yang dijelaskan oleh [Zamhari \(2012\)](#), pada masa lalu status sosial ditentukan oleh keturunan dan sistem kelas yang kaku, namun saat ini pendidikan dipercaya sebagai jalan utama untuk memperbaiki nasib dan mencapai mobilitas vertikal.

Dalam konteks masyarakat miskin, pendidikan seringkali dianggap sebagai satu-satunya warisan yang dapat orang tua berikan kepada anak-anak mereka. Meskipun berada dalam keterbatasan ekonomi, banyak orang tua dari kalangan tidak mampu rela bekerja keras demi memastikan anak-anak mereka tetap bersekolah. Pendidikan dalam pandangan mereka bukan hanya sekadar kewajiban formal, melainkan merupakan investasi sosial jangka panjang yang diharapkan dapat meningkatkan status ekonomi keluarga dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi selanjutnya. Seperti yang dinyatakan oleh [Ustama \(2009\)](#), pendidikan dipahami sebagai sarana penting dalam proses pembangunan serta sebagai peluang untuk berkompetisi dalam memperoleh kehidupan yang lebih sejahtera. Meskipun penghasilan mereka tidak mencukupi untuk menutupi biaya pendidikan, para orang tua tetap mendorong anak-anaknya untuk bersekolah hingga perguruan tinggi. [Muzakir & Yunanda \(2021\)](#) menyebutkan bahwa motivasi para orang tua dari keluarga miskin untuk mendorong anak-anak mereka menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi didasari oleh keyakinan kuat akan pentingnya pendidikan, bahkan di tengah keterbatasan ekonomi. Kondisi finansial keluarga tidak dianggap sebagai hambatan utama dalam upaya meraih keberhasilan pendidikan.

Penelitian terdahulu juga mendukung pandangan ini. Penelitian oleh [Kustanto \(2019\)](#) yang berjudul “Konstruksi Sosial Tentang Pendidikan Pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kabupaten Sidoarjo” menunjukkan bahwa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Sidoarjo memandang pendidikan sebagai akses ekonomi dengan memperoleh pekerjaan. Melalui KPM PKH diharapkan anak-anak mereka dapat keluar dari kemiskinan melalui pendidikan dan mendapatkan pekerjaan yang terjamin.

Hal serupa juga ditemukan dalam penelitian [Fadhila \(2022\)](#) terhadap keluarga nelayan di Dusun Gowah, Desa Blimbing, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat nelayan di Dusun Gowah memiliki tingkat pendidikan yang rendah, mereka sangat mendorong anak-anak mereka untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Pendidikan dipandang sebagai satu-satunya cara agar anak-anak tidak lagi mengikuti jejak orang tua mereka sebagai nelayan, yang hidup dalam kondisi ekonomi yang tidak menentu. Dalam konteks ini, pendidikan dipersepsikan sebagai jalan untuk melepaskan diri dari pekerjaan yang dianggap kurang menjanjikan secara ekonomi.

Meskipun demikian, terdapat perbedaan pandangan antara masyarakat perkotaan dan pedesaan. Masyarakat dari wilayah perkotaan umumnya lebih optimis terhadap pendidikan karena akses mereka terhadap fasilitas pendidikan relatif lebih baik. Sedangkan di daerah pedesaan, sebagian besar keluarga masih terjebak dalam dilema ekonomi. Mereka memandang pendidikan sebagai hal penting, tetapi keterbatasan ekonomi memaksa mereka untuk memprioritaskan anak-anak bekerja membantu pendapatan keluarga. Kondisi ini menunjukkan bahwa persepsi positif terhadap pendidikan tidak selalu sejalan dengan kemampuan nyata untuk mengakses dan memanfaatkannya secara optimal.

Di beberapa wilayah pedesaan juga masih ditemukan orang tua yang kurang memberikan dukungan penuh terhadap pendidikan anak perempuan, dengan alasan-alasan tradisional yang menekankan peran perempuan di ranah domestik. Penelitian oleh [Wijayanti & Jatingsih \(2022\)](#) terhadap Masyarakat desa Gumeng, Mojokerto menunjukkan bahwa terdapat perlakuan berbeda terhadap laki-laki dan perempuan. Masyarakat cenderung lebih mendorong anak laki-laki melanjutkan pendidikan tinggi, sementara perempuan diarahkan untuk menikah. Orang tua lebih memilih menyekolahkan anak laki-laki hingga jenjang pendidikan tinggi karena mereka dianggap sebagai calon pencari nafkah keluarga, sehingga pendidikan tinggi dipandang sebagai bekal penting untuk mewujudkan harapan orang tua tersebut. Selain itu, anggapan masyarakat Desa Gumeng bahwa menikah di usia muda adalah hal yang wajar dan tidak menjadi masalah, bahkan dianggap sebagai pilihan hidup setelah lulus SMA/SMK. Mereka meyakini bahwa dengan menikah, perempuan dapat membanggakan orang tua sekaligus meringankan beban keluarga.

Berdasarkan teori Bourdieu yang menyatakan bahwa habitus merupakan nilai-nilai yang tertanam dalam individu dan menjadi pendorong dalam bersikap serta bertindak di tengah kehidupan sosial. Temuan ini menunjukkan adanya hubungan erat antara kebiasaan yang telah mengakar sebagai norma dalam bertindak dengan kondisi lingkungan sosial sebagai satu kesatuan yang membentuk struktur kehidupan masyarakat. Lingkungan sosial merupakan ruang berinteraksi, baik dengan keluarga, teman sebaya, maupun dalam organisasi yang menjadi pondasi utama dalam pembentukan karakter, pola pikir, tindakan individu ([Jamaluddin et al., 2022](#)). Habitus atau pola pikir dan tindakan yang dibentuk oleh kondisi sosial-ekonomi ini membuat seseorang memiliki pilihan yang terbatas, termasuk pendidikan. Sebagaimana realitas di masyarakat menunjukkan bahwa setiap individu memiliki cara pandang yang berbeda-beda terhadap pendidikan. Perbedaan ini dipengaruhi oleh berbagai pola pikir yang berkembang. Masyarakat tradisional

atau yang masih tertinggal cenderung kurang memahami pentingnya pendidikan, sehingga banyak anak-anak mereka yang tidak bersekolah atau berhenti di tengah proses pendidikan (Irwan, 2017).

Faktor Penghambat Pendidikan Sebagai Alat Mobilitas Sosial

Pendidikan saat ini dipandang sebagai kebutuhan penting oleh mayoritas masyarakat dan diyakini mampu mengubah kehidupan seseorang menjadi lebih baik. Melalui pendidikan, individu memperoleh motivasi dan bekal untuk terus belajar untuk meningkatkan kualitas hidup dan membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Namun, realitanya menunjukkan bahwa tidak semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan yang layak. Fasilitas pendidikan yang memadai masih belum merata di berbagai daerah, terutama di wilayah-wilayah terpencil dan tertinggal. Kondisi ini menyebabkan terhambatnya proses pendidikan bagi sebagian besar masyarakat miskin yang justru sangat berharap pada pendidikan sebagai jalan keluar dari kemiskinan.

Penelitian yang dilakukan oleh Arifin (2017) menguatkan pernyataan tersebut bahwa ketimpangan sosial-ekonomi, kondisi geografis, dan budaya lokal turut memengaruhi efektivitas pendidikan dalam mendorong mobilitas sosial. Masyarakat yang hidup dalam lingkungan dengan tingkat ketimpangan rendah cenderung memiliki akses yang lebih baik terhadap pendidikan tinggi, dan hal ini berdampak langsung pada peluang mobilitas sosial vertikal. Sebaliknya, masyarakat di daerah dengan ketimpangan tinggi sering kali terjebak dalam siklus keterbatasan yang sulit diputus. Beberapa studi empiris telah menegaskan bahwa kondisi sosial-ekonomi secara umum sangat memengaruhi efektivitas pendidikan sebagai alat mobilitas sosial.

Penelitian oleh Fadhila (2022) terhadap Masyarakat nelayan di Dusun Gowah, Kabupaten Lamongan menunjukkan bahwa pendidikan menjadi faktor yang bisa mendorong sekaligus menghambat mobilitas sosial. Di satu sisi, motivasi untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik dan keinginan untuk keluar dari profesi nelayan menjadi pendorong kuat bagi keluarga untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Namun di sisi lain, hambatan ekonomi, diskriminasi kelas, dan resistensi terhadap perubahan budaya menjadi faktor yang menahan sebagian masyarakat untuk memanfaatkan pendidikan secara maksimal.

Kendala ekonomi menjadi tantangan utama, terutama bagi mereka yang berasal dari keluarga berpenghasilan rendah. Keterbatasan dalam hal keuangan memengaruhi akses mereka terhadap pendidikan yang layak, mulai dari mahalnya biaya sekolah hingga kebutuhan tambahan seperti buku, transportasi, dan les privat. Keluarga kurang mampu mengalami kesulitan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena harus bekerja demi membantu penghasilan keluarga atau tidak sanggup menanggung biaya pendidikan. Kondisi ini mencerminkan bahwa pendidikan, yang seharusnya menjadi hak mendasar bagi setiap orang, justru menjadi sulit dijangkau oleh mereka yang tidak memiliki cukup sumber daya ekonomi (Fukaro, 2025).

Sementara itu, kondisi geografis dan kultural juga turut mempengaruhi persepsi Masyarakat setempat terhadap pendidikan sehingga menghambat mobilitas sosial. Lokasi wilayah yang jauh dari pusat kota juga seringkali menjadi hambatan akses ke pendidikan yang berkualitas. Kemiskinan dan ketimpangan sosial yang terjadi di daerah pinggiran kota berdampak langsung pada rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Keterbatasan dalam mengakses layanan dasar seperti kesehatan dan pekerjaan juga turut menghambat peluang untuk keluar dari lingkaran kemiskinan (Tinri & Anas, 2025).

Anak-anak dari keluarga miskin menghadapi keterbatasan akses terhadap pendidikan berkualitas, tidak memiliki fasilitas pendukung belajar yang memadai, serta jarang mendapatkan bimbingan belajar. Sebaliknya, anak-anak dari keluarga dengan kondisi ekonomi lebih baik memiliki akses terhadap sekolah unggulan dan pendampingan akademik yang lebih intensif. Lingkungan sosial juga memainkan peran penting dalam membentuk semangat belajar dan aspirasi masa depan anak (Edo & Yasin, 2024).

Salah satu bentuk ketimpangan pendidikan yang paling mencolok di Indonesia terlihat pada perbedaan antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Sekolah negeri, terutama di wilayah miskin, seringkali kekurangan sumber daya dan fasilitas pendukung. Sementara itu, sekolah swasta unggulan dilengkapi dengan berbagai fasilitas canggih dan program pembelajaran berkualitas. Ketidakmerataan ini menjadi dampak nyata dari praktik komersialisasi pendidikan, di mana pendidikan menjadi barang mahal yang hanya bisa diakses oleh kelompok masyarakat berdaya beli tinggi. Anak-anak dari keluarga kurang mampu harus puas dengan pendidikan yang berkualitas rendah, sementara anak-anak dari keluarga kaya dapat menikmati fasilitas terbaik. Akibatnya, kesenjangan sosial semakin melebar dan proses mobilitas sosial menjadi tidak setara.

Pendidikan dipandang sebagai komoditas pasar hanya menguntungkan kelompok elit ekonomi, sementara kelompok rentan semakin terpinggirkan. Situasi ini memperkuat siklus kemiskinan antar generasi, membatasi peluang mobilitas sosial, dan memperparah jurang ketimpangan antara sekolah elit dan sekolah yang kurang mampu. Selain itu, beban biaya pendidikan yang tinggi juga menimbulkan tekanan sosial dan psikologis bagi keluarga miskin, sehingga semakin memperkuat eksklusi sosial dalam sistem pendidikan.

Bahkan, dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi mengancam fungsi negara dalam menjamin hak pendidikan yang merata bagi seluruh warganya (Ferdino & Sirozi, 2025).

Temuan ini sejalan dengan teori Pierre Bourdieu yang menyatakan bahwa menyatakan bahwa struktur sosial dapat menjadi penghalang bagi individu dalam mengakses pendidikan berkualitas, khususnya bagi mereka yang berasal dari keluarga berpenghasilan rendah. Dalam konteks ini sistem pendidikan sering kali mereproduksi ketimpangan sosial alih-alih menguranginya. Pendidikan sangat dipengaruhi oleh modal ekonomi, sosial, dan kultural yang dimiliki. Anak-anak dari keluarga miskin memasuki sistem pendidikan dengan keterbatasan modal dalam segala aspek, sehingga cenderung tertinggal dibandingkan anak-anak dari keluarga yang lebih mapan.

Modal sosial seperti jaringan, referensi, dan dukungan lingkungan juga berperan penting dalam menentukan sejauh mana pendidikan bisa menjadi alat mobilitas sosial. Para orang tua juga dihadapkan pada dilema antara memenuhi kebutuhan dasar keluarga dan memberikan pendidikan bagi anak-anak mereka, yang mencerminkan adanya ketimpangan dalam akses terhadap pendidikan. Keterbatasan yang dialami keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan sumber daya pendidikan yang memadai semakin memperkuat posisi mereka di lapisan bawah struktur sosial dan menghambat peluang mobilitas sosial bagi anak-anak mereka (Ali & Asriwandari, 2024).

Peran Pemerintah dan Masyarakat

Dalam proses mobilitas sosial, kebijakan pemerintah memainkan peran yang penting sebagai pengarah, fasilitator, dan pengatur jalannya perubahan sosial. Kebijakan publik dapat mendorong masyarakat untuk melakukan mobilisasi, baik secara geografis maupun sosial. Salah satu contohnya adalah kebijakan pemindahan modal dan pembangunan infrastruktur yang berdampak pada terbukanya lapangan pekerjaan di wilayah baru. Sebagaimana menurut Fadhila (2022), Pemerintah membuat kebijakan dengan memberikan ruang bagi Masyarakat untuk berpindah dari desa ke kota dalam rangka memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Selain mempercepat pertumbuhan sektor industri, kebijakan ini turut mendorong mobilitas sosial vertikal masyarakat yang sebelumnya terbatas secara ekonomi.

Dalam sektor pendidikan, kebijakan pemerintah dibentuk melalui berbagai regulasi, mulai dari konstitusi seperti Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat mandat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, hingga peraturan teknis seperti Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), peraturan pemerintah, dan peraturan menteri. Semua peraturan ini bertujuan untuk menyediakan sistem pendidikan yang merata, berkualitas, dan inklusif. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal implementasi yang belum sepenuhnya merata di seluruh wilayah Indonesia (Ulum et al., 2023).

Salah satu bentuk intervensi positif pemerintah dalam upaya mendorong mobilitas sosial masyarakat miskin adalah melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini merupakan bagian dari sistem perlindungan sosial yang bertujuan mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu. PKH memberikan bantuan bersyarat yang mendorong keluarga penerima manfaat (KPM) untuk menyekolahkan anak-anak mereka, memanfaatkan layanan kesehatan, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan (Juwita, 2023). Di Desa Tindalun, Kabupaten Enrekang, implementasi PKH telah menunjukkan hasil yang positif. Terjadi peningkatan rata-rata jenjang pendidikan anak-anak KPM dibandingkan orang tuanya. Hal ini mencerminkan keberhasilan mobilitas sosial vertikal antargenerasi yang didorong oleh dukungan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan.

Salah satu langkah yang ditempuh pemerintah untuk memperluas akses ke pendidikan tinggi adalah Program Indonesia Pintar (PIP). Program ini mulai dikenalkan pada tahun 2020 sebagai pengganti dari beasiswa sebelumnya yang bernama Bidikmisi. Pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 meluncurkan Program Indonesia Pintar (PIP), yang salah satu bentuk implementasinya di tingkat perguruan tinggi adalah Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. KIP Kuliah merupakan bantuan pendidikan bagi lulusan SMA, SMK, dan sederajat yang berasal dari keluarga kurang mampu agar dapat melanjutkan studi ke perguruan tinggi secara gratis. Secara prinsip, KIP Kuliah berbeda dari beasiswa pada umumnya. Jika beasiswa biasanya diberikan sebagai bentuk penghargaan atas prestasi, KIP Kuliah lebih ditujukan bagi mahasiswa yang memiliki potensi akademik namun terkendala secara ekonomi (Sari et al., 2024).

Namun demikian, tidak semua kebijakan pemerintah mendukung secara optimal proses mobilitas sosial. Dalam praktiknya, pelaksanaan kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal implementasi yang belum sepenuhnya merata di seluruh wilayah Indonesia (Ulum et al., 2023). Dalam beberapa kasus, kebijakan justru berpotensi menjadi penghambat mobilitas vertikal bagi individu tertentu.

Sebagaimana dalam penelitian Ulum et al. (2023) yang mengkaji kebijakan Permendikbudristek Nomor 40 Tahun 2021 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Dalam Pasal 8, disebutkan bahwa jangka waktu penugasan kepala sekolah dapat berlangsung hingga empat periode atau setara dengan 16

tahun. Dalam praktiknya, banyak kepala sekolah menjabat hingga pensiun. Ketentuan ini dinilai belum mencerminkan pemerataan kesempatan karier bagi guru-guru lain yang memiliki kompetensi dan potensi untuk menduduki posisi tersebut. Akibatnya, kesempatan untuk naik jenjang karier atau melakukan mobilitas sosial vertikal menjadi sangat terbatas, terutama di lingkungan birokrasi pendidikan.

Dari temuan-temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah dalam mendukung mobilitas sosial masyarakat melalui pendidikan mengandung dua sisi, yaitu positif dan negatif. Di satu sisi, kebijakan seperti PKH dan pembangunan infrastruktur terbukti mampu mendorong perubahan sosial yang positif. Namun di sisi lain, masih terdapat regulasi yang secara tidak langsung mempersempit ruang gerak individu untuk meningkatkan posisi sosialnya. Sehingga kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan dan mobilitas sosial perlu terus dievaluasi agar benar-benar memberikan peluang yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat miskin memiliki persepsi yang positif terhadap Pendidikan. Mereka mengakui pentingnya pendidikan sebagai bekal masa depan. Namun Sebagian lain sebagian dari mereka meragukan efektivitas pendidikan tinggi dalam menjamin mobilitas sosial. Faktor penghambat utama dalam menjadikan pendidikan sebagai alat mobilitas sosial meliputi kemiskinan struktural, rendahnya latar belakang pendidikan orang tua, keterbatasan akses dan fasilitas pendidikan, serta kebutuhan ekonomi keluarga yang memaksa anak untuk bekerja. Pemerintah menunjukkan peran melalui berbagai kebijakan dan program seperti PKH dan KIP Kuliah. Namun pelaksanaannya belum merata dan dalam beberapa kasus justru membatasi kesempatan mobilitas sosial. Peran masyarakat, terutama orang tua, sangat krusial dalam memberikan dorongan atau sebaliknya menjadi hambatan bagi keberlanjutan pendidikan anak-anak mereka. Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini diantaranya, pemerintah perlu meningkatkan pemerataan akses pendidikan berkualitas, khususnya di daerah tertinggal, evaluasi kebijakan pendidikan perlu dilakukan secara berkala agar tidak menimbulkan ketimpangan sosial, dan sosialisasi tentang pentingnya pendidikan sebagai alat mobilitas sosial harus ditingkatkan di kalangan masyarakat miskin.

Daftar Pustaka

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Jurnal Edumaspul*, 6(1), 974-980.
- Ali, M. N. R., & Asriwandari, H. (2024). Pendidikan Formal Anak Pada Keluarga Miskin di Kelurahan Sialangmunggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru. *Risoma: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 2(5), 216-225.
- Allolayuk, A. (2021). Menyingkap sisi gelap pendidikan sebagai arena reproduksi kesenjangan sosial berdasarkan perspektif Pierre Bourdieu. *Syntax Idea*, 3(8), 1802-1813.
- Arifin, M. H. (2017). Memahami Peran Pendidikan Tinggi terhadap Mobilitas Sosial di Indonesia. *Masyarakat: Jurnal Sosiologi*, 22(2), 2.
- Arismunandar, S. (2009). Pierre Bourdieu dan Pemikirannya tentang Habitus, Doxa dan Kekerasan Simbolik. Universitas Indonesia.
- Ariyani, N. I., Demartoto, A., & Zuber, A. (2018). Habitus pengembangan desa wisata kuwu: studi kasus desa wisata kuwu kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 4(2).
- Edo, A., & Yasin, M. (2024). Dampak Kesenjangan Akses Pendidikan dan Faktor Ekonomi Keluarga terhadap Mobilitas Sosial. *Jurnal Ilmu Pendidikan & Sosial (SINOVA)*, 2(3), 317-326.
- Fadhila, S. N. (2022). Nelayan dan Mobilitas Sosial: Studi Mobilisasi Generasi Keluarga Nelayan di Dusun Gowah Desa Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. *Journal of Islamic Community Development*, 2(2), 1-14.
- Ferdino, M. F., & Sirozi, M. (2025). Dampak Ekonomi Neoliberal Terhadap Sistem dan Tata Kelola Pendidikan Di Indonesia. *Jurnal Inovasi Pendidikan Dan Sains*, 6(1), 80-88.
- Fukaro, A. (2025). Pengaruh latar belakang sosial terhadap kesempatan pendidikan. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(2), 1214-1220.
- Jamaluddin, J., Quthny, Y. A., & Bahrudin, B. (2022). Persepsi Masyarakat Terhadap Pentingnya Pendidikan Pada Remaja Di Desa Liprak Kidul Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo. *Pendekar: Jurnal Pendidikan Berkarakter*, 5(2), 105-111.

-
- Juwita, J. (2023). Efektivitas Program Keluarga Harapan Sebagai Upaya Mendorong Mobilitas Sosial Dalam Bidang Pendidikan Pada Warga Desa Tindalun Kabupaten Enrekang. Universitas Hasanuddin.
- Irwan, I. (2017). Persepsi Keluarga Petani terhadap Pendidikan Formal Anak di Desa Sungai Toman Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas. Universitas Tanjungpura.
- Kustanto, M. (2019). Konstruksi Sosial Tentang Pendidikan Pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Sidoarjo. *Sosio Konsepsia*, 8(3), 267-286.
- Lutfillah, M. M., Marini, A., & Nafiah, M. (2022). Pengelolaan pendidikan dasar dikaitkan dengan mobilitas sosial. *An-Nidzam: Jurnal Manajemen Pendidikan dan Studi Islam*, 9(1), 126-143.
- Malahati, F., Jannati, P., Qathrunnada, Q., & Shaleh, S. (2023). Kualitatif: Memahami karakteristik penelitian sebagai metodologi. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 11(2), 341-348.
- Muzakkir, M., & Yunanda, R. (2021). Strategi orang tua keluarga miskin dalam meningkatkan pendidikan anak. *Jurnal Sosiologi Dialektika Sosial*, 7(1), 41-50.
- Padang, P., Tamba, I. N., Manik, V. L. B., & Yunita, S. (2024). Pengaruh Pendidikan Terhadap Mobilitas Sosial di Masyarakat Perkotaan. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 5(3), 3652-3657.
- Qomaruddin, Q., & Sa'diyah, H. (2024). Kajian teoritis tentang teknik analisis data dalam penelitian kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman. *Journal of Management, Accounting, and Administration*, 1(2), 77-84.
- Rahman, P. A., Firman, F., & Rusdinal, R. (2019). Kemiskinan dalam perspektif ilmu sosiologi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 3(3), 1542-1548.
- Sari, N. D., Rahayu, N. D., Salimah, B. S., Firmansah, N. M. H., & Khoiriawati, N. (2024). Strategi Kebijakan Publik Melalui Program Pengentasan Kemiskinan di Era Pemerintahan Jokowi. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen*, 3(2), 14-25.
- Setiani, N., Hermawan, W., & Komarulzaman, A. (2023). Pengujian Peran Pendidikan dalam Pengentasan Kemiskinan Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 153-160.
- Tinri, M. D. N., & Anas, F. (2025). Ketimpangan Sosial dan Akses Terhadap Teknologi: Dampaknya Terhadap Mobilitas Sosial Masyarakat di Kota Makassar. *JUPEIS: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 4(2), 9-14.
- Ulum, U. A., Syarifudin, E., & Atikah, C. (2023). Mobilitas Sosial pada Jabatan Fungsional Guru: Sebuah Analisis Kebijakan Pendidikan. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(8), 6411-6414.
- Ustama, D. D. (2009). Peranan pendidikan dalam pengentasan kemiskinan. *Dialogue*, 6(1), 1-12.
- Wijayanti, M., & Jatningsih, O. (2022). Persepsi Masyarakat Desa Gumeng Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto Terhadap Pendidikan Tinggi Bagi Perempuan. *Journal of Civics and Moral Studies*; 6(2), 47-63.
- Zamhari, A. (2012). Pengaruh Pendidikan Terhadap Mobilitas Sosial. *Ta'limuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 127-140.